



## SIARAN PERS

### “TRANPARASI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI PUBLIK SERTA FPIC DALAM RENCANA PENGEMBANGAN PLTN DI INDONESIA”

*PLTN teknologi yang beresiko dan mahal dan memiliki konsekuensi jangka panjang. Keputusan pembangunan PLTN tidak boleh hanya dibuat oleh segelintir orang. Publik harus terlibat dalam pengambilan keputusan pengembangan PLTN di Indonesia*

**Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Institute for Essential Services Reform (IESR)** dan **Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB)** mendesak agar pemerintah segera membuka ruang dialog yang sebesar-besarnya dengan pemangku kepentingan dan menyiapkan proses konsultasi publik terkait dengan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Menurut kami, hingga hari ini PLTN merupakan teknologi yang memiliki tingkat resiko yang tinggi dan konsekuensi biaya yang mahal. Dengan membangun PLTN maka berbagai resiko dan konsekuensi tersebut tidak hanya ditanggung oleh generasi saat ini, tapi juga generasi masa depan.

Keputusan membangun PLTN tidak dapat hanya diputuskan oleh segelintir *elite* pemerintah dan pejabat publik di eksekutif dan legislatif. Untuk itulah publik harus ikut terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan PLTN, yang dimulai dengan akses terhadap informasi dan dokumen yang dijadikan rujukan untuk rencana pembangunan PLTN dan pengembangan Reaktor Daya Eksperimen (RDE). Langkah selanjutnya adalah merancang proses konsultasi yang melibatkan publik yang telah terinformasi secara cukup untuk menyatakan pendapat dan/atau persetujuannya terhadap wacana pengembangan PLTN dan RDE. Langkah-langkah ini diperlukan sebelum pemerintah membuat keputusan politik tentang PLTN.

Teknologi PLTN memiliki karakteristik yang berbeda dengan teknologi pembangkit lainnya. Di negara-negara yang telah mengoperasikan PLTN, industri ini diregulasi secara ketat oleh badan pengawas atau badan pengatur khusus untuk menjamin teknologi ini dapat beroperasi secara aman. Di tingkat internasional, badan khusus PBB juga mengawasi secara ketat aplikasi teknologi nuklir untuk pembangkitan listrik dan menerapkan berbagai standar untuk memastikan PLTN komersial berjalan dengan aman.

Walaupun demikian, berbagai regulasi ini tidak dapat memitigasi sepenuhnya resiko-resiko dari pengoperasian PLTN. Resiko-resiko tersebut inheren ada pada teknologi ini dan ditambah dengan faktor-faktor eksternal yaitu ancaman bencana alam dan kesalahan manusia (*human error*). Kecelakaan Three Miles Island di AS, bencana nuklir PLTN Chernobyl dan bencana PLTN Fukushima menjadi contoh bahwa resiko kecelakaan dan bencana nuklir selalu ada.

Untuk itu kami mengkritik sikap sejumlah Menteri dan pejabat publik yang secara aktif berbicara yang menyatakan seolah-olah PLTN itu murah, bersih dan aman. Pernyataan ini tidak akurat dan bertentangan dengan fakta, serta tanpa adanya kuantifikasi yang jelas

terhadap makna “murah, bersih dan aman,” dan berpotensi menjadi informasi yang menyesatkan publik.

“Secara fakta, PLTN adalah teknologi yang beresiko tinggi dan mahal. Dengan menafikan resiko-resiko yang dapat membahayakan keberlanjutan manusia dan lingkungan dari awal, sukar kiranya mempercayai bahwa sekiranya PLTN dibangun, pemerintah atau otoritas yang berwenang akan secara serius menangani berbagai potensi resiko secara cermat dan hati-hati,” kata Direktur IESR yang juga *Readers on Energy Issues* di Thamrin School, Fabby Tumiwa.

Thamrin School, IESR dan KPBB mendesak agar Kementerian Ristek dan Dikti, BATAN, dan Kementerian ESDM membuka akses data, informasi dan kajian yang seluas-luasnya kepada publik tentang rencana pembangunan PLTN tersebut. Apalagi berbagai data, informasi dan kajian tersebut dikumpulkan atau disusun dengan menggunakan anggaran negara.

“Transparansi rencana pengembangan PLTN dan keterbukaan informasi serta partisipasi publik merupakan suatu keharusan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang didorong oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dalam melibatkan pemangku kepentingan pada seluruh rantai daur hidur nuklir,” kata Farhan Helmy, Kepala Sekolah Thamrin School.

**Thamrin School, IESR dan KPBB juga mengkritisi rencana pembangunan Reaktor Daya Eksperimen (RDE) di kawasan Serpong. Rencana yang telah masuk dalam RPJMN 2015-2019, merupakan contoh praktek yang kurang transparan dan mengabaikan *consent* publik. Ketiga organisasi ini juga menanyakan urgensi dari kegiatan ini, sumber daya anggaran yang akan dihabiskan, manfaat keseluruhan, dan korelasinya dengan Nawa Cita Jokowi-JK yang melandasi semangat RPJMN 2015-2019. Ketiga lembaga ini juga mendesak Bappenas meninjau ulang rencana pembangunan RDE yang diajukan BATAN dan meminta Presiden untuk menaruh perhatian serius akan implikasinya bagi masyarakat. Selain ketiadaan partisipasi publik dalam penyusunan rencana ini, ketidakjelasan manfaat proyek ini, aspek teknis terkait dengan ketidakjelasan pilihan teknologi reaktor HTGR, dan minimnya kajian resiko Prinsip *Free, prior and informed consent (FPIC)* juga haruslah selalu digunakan dalam keseharian pengambilan keputusan kebijakan publik agar pemahaman dampak dipahami bersama dan dibangun konsensus yang rasional dan adil.**

Thamrin School, secara khusus menyoroti masih minimnya perangkat regulasi terkait dengan peraturan zonasi (zoning regulation) dan rencana rinci tata ruang, serta kapasitas untuk memastikan pelaksanaan tata ruang nasional dan daerah, termasuk penegakkan aturan, yang dapat melindungi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan fungsi ekosistem. Untuk itu, Thamrin School mendesak pemerintah agar lebih dulu memperkuat regulasi tata ruang, khususnya aturan teknis yang mengatur pedoman dan kriteria kawasan yang akan direncanakan atau dikembangkan untuk kegiatan terkait teknologi nuklir, dan menuntaskan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum memberikan rekomendasi ruang dan menetapkan lokasi PLTN seperti yang diamanatkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Thamrin School, IESR dan KPBB juga mendesak agar pemerintah dapat mengkomunikasikan resiko-resiko teknologi PLTN secara berimbang, benar, dan faktual kepada publik. Sebagai pejabat publik, Menteri Ristek dan Teknologi dan kepala BATAN diharapkan tidak menjadi *campaigner* PLTN, tetapi terlebih utama merancang proses untuk berdialog dengan masyarakat dan membuat kebijakan publik yang dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya nuklir. Selain itu, eksplorasi tentang berbagai pilihan kebijakan dan teknologi energi

yang lebih efisien, dan beresiko rendah perlu dikedepankan. mengingat Indonesia memiliki potensi energi yang luar biasa yang belum termanfaatkan secara optimal.

Jakarta, 22 Mei 2015

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Fabby Tumiwa (0811-949-759), Direktur IESR/*Thamrin School Reader on Energy Issue*; Jalal (0815-1380-3616), *Thamrin School Reader on Political Economy and Corporate Governance*, Farhan Helmy, Kepala Sekolah Thamrin School, *Climate Change Governance and Policy Expert* (0821-1782-1871),

**Thamrin School of Climate Change and Sustainability** merupakan inisiatif multipihak untuk mendorong pemikiran kritis dan progresif tatakelola sumberdaya alam, lingkungan dan perubahan iklim yang adil, berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik. Thamrin School didukung oleh pakar dan praktisi yang mumpuni dalam memfasilitasi berbagai kegiatan untuk menjaga agar lalulintas pertukaran pengetahuan dan gagasan berlangsung terbuka, ilmiah dan memberikan suatu pencerahan yang objektif. Informasi lebih lanjut; [www.thamrinschool.net](http://www.thamrinschool.net),

**Contact Person:** Farhan Helmy, Kepala Sekolah Thamrin School, email: [farhan.helmy@thamrinschool.net](mailto:farhan.helmy@thamrinschool.net), [farhan.helmy@gmail.com](mailto:farhan.helmy@gmail.com), HP: +62-821-17821871